



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.9.902.571.031.458,00 (sembilan triliun sembilan ratus dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.5.006.440.726.046,00 (lima triliun enam miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.680.900.000.000,00 (tiga triliun enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus juta rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.669.359.773,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.98.652.509.792,00 (sembilan puluh delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.215.218.856.481,00 (satu triliun dua ratus lima belas miliar dua ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

#### Pasal 5

Pendapatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.680.900.000.000,00 (tiga triliun enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas :

- a. Pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.1.002.000.000.000,00 (satu triliun dua miliar rupiah);
- b. bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp.970.000.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh miliar rupiah);
- c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp.1.135.000.000.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar rupiah);
- d. pajak air permukaan sebesar Rp.13.100.000.000,00 (tiga belas miliar seratus juta rupiah); dan
- e. pajak rokok sebesar Rp.560.800.000.000,00 (lima ratus enam puluh miliar delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 6

Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.1.215.118.856.481,00 (satu triliun dua ratus lima belas miliar seratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas :

- a. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp.5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah);
- b. jasa giro sebesar Rp.28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);
- c. pendapatan bunga sebesar Rp.121.500.000.000,00 (seratus dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah);
- d. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.217.500.000.000,00 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah); dan
- f. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp.111.631.808.295,00 (seratus sebelas miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

#### Pasal 7

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.856.972.461.000,00 (empat triliun delapan ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

#### Pasal 8

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.39.157.844.412,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

#### Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.9.766.471.031.458,00 (sembilan triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja Operasional;
- b. belanja Modal;
- c. belanja Tidak Terduga; dan
- d. belanja Transfer.



### Pasal 10

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.5.008.939.321.622,00 (lima triliun delapan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.605.363.817.438,00 (dua triliun enam ratus lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.997.737.680.721,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.389.337.823.463,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

### Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.605.363.817.438,00 (dua triliun enam ratus lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja tambahan penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya;

- d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - f. belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - g. belanja Pegawai BOS; dan
  - h. belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.534.298.349.774,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.439.505.614.378,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.467.410.517.286,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.69.052.055.000,00 (enam puluh sembilan miliar lima puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.249.964.000,00,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.149.479.000,00 (tujuh miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.78.301.238.000,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- (9) belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 9.396.600.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.534.298.349.774,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. gaji Pokok ASN;
  - b. tunjangan Keluarga ASN;
  - c. tunjangan Jabatan ASN;
  - d. tunjangan Fungsional ASN;
  - e. tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. tunjangan Beras ASN;
  - g. tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. pembulatan Gaji ASN;
  - i. iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. iuran Jaminan Kecelakaan ASN;
  - k. iuran Jaminan Kematian ASN; dan
  - l. iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.159.087.139.600,00 (satu Triliun seratus lima puluh sembilan miliar delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.125.753.306.994,00 (seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.438.691.000,00 (empat belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.52.706.810.625,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.34.308.102.192,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan juta seratus dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.77.536.636.808,00 (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.574.568.767,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.26.265.884,00 (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.49.647.710.133,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.179.803.981,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.8.131.087.000,00 (delapan miliar seratus tiga puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).

- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 6.908.226.790,00 (enam miliar sembilan ratus delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.439.505.614.378,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- tambahan penghasilan ASN berdasarkan beban kerja;
  - tambahan penghasilan ASN berdasarkan tempat bertugas; dan
  - tambahan penghasilan ASN berdasarkan kondisi kerja;
- (2) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.79.548.036.378,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.149.240.000,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.358.808.338.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.467.410.517.286,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. belanja Tambahan Penghasilan (tamsil) Guru PNSD;
  - e. belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN; dan
  - f. belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.107.971.879.772,00 (seratus tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.168.855.000,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
  - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.317.545.613.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).
  - (5) Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.17.400.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus juta rupiah).
  - (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.24.014.449.514,00 (dua puluh empat miliar empat belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.997.737.680.721,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
  - a. belanja Barang; dan
  - b. belanja Jasa;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.450.204.234.190,00 (empat ratus lima puluh miliar dua ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.773.081.955.381,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Pasal 17

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.389.337.823.463,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat dan Partai Politik.

Pasal 18

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.445.742.037.574,00 (satu triliun empat ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja Modal Tanah;
  - b. belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. belanja Modal Bangunan dan Gedung;
  - d. belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.403.511.169,00 (delapan miliar empat ratus tiga juta lima ratus sebelas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.314.832.972.271,00 (tiga ratus empat belas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.374.675.426.771,00 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.663.622.420.120,00 (enam ratus enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.83.288.206.243,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

#### Pasal 19

Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp.3.295.789.672.262,00 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.777.650.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.518.139.672.262,00 (satu triliun lima ratus delapan belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).



Pasal 21

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran direncanakan sebesar Rp.588.500.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 22

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp. 226.200.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus juta rupiah) yang terdiri atas sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 23

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 direncanakan sebesar Rp.226.200.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus juta rupiah) terdiri atas ;
  - a. pelampauan Penerimaan PAD;
  - b. pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
  - c. penghematan Belanja; dan
  - d. sisa Belanja Lainnya;
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah);
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah).
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.450.000.000,00 (empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp.362.300.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas :
  - a. penyertaan modal daerah; dan
  - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.300.000.000.00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.360.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar rupiah).

Pasal 25

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus sebesar Rp.136.100.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar seratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.136.100.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar seratus juta rupiah).

Pasal 26

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian. DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan infrastruktur Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27.

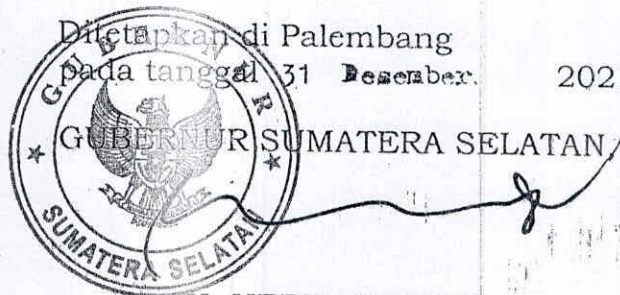
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

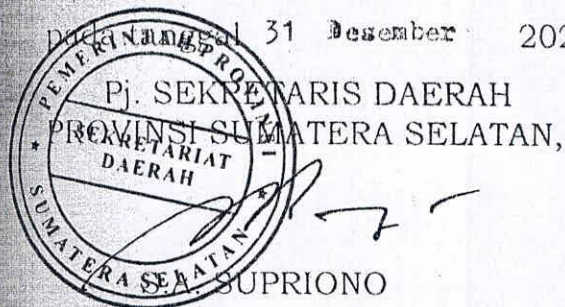
Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2021



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 31 Desember 2021



Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

SUPRIONO



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**RINGKASAN PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2022**

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>5.006.440.726.046</b>
4.1.01	Pajak Daerah	3.680.900.000.000
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.002.000.000.000
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	15.290.400.000
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	15.120.000.000
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	49.400.000
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	121.000.000
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	53.287.150.000
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	52.704.000.000
4.1.01.01.02.0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	166.250.000
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	416.900.000
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	502.922.150.000
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	497.408.950.000
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	1.567.500.000
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	3.945.700.000
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	1.608.600.000
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	903.600.000
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	330.000.000
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	375.000.000
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	3.226.900.000
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	2.000.000.000
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	1.036.500.000
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	190.400.000
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	171.014.900.000
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	148.027.500.000
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	19.375.400.000
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	3.612.000.000
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	77.649.200.000
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	70.565.000.000
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	6.844.200.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	240.000.000
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	6.513.600.000
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	4.797.900.000
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	1.307.500.000
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	408.200.000
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.418.100.000
4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	2.168.100.000
4.1.01.01.09.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	0
4.1.01.01.09.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	250.000.000
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	167.926.290.356
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	166.912.290.356
4.1.01.01.10.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	0
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	1.014.000.000
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	142.709.644
4.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	142.709.644
4.1.01.01.11.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	0
4.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	0
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	970.000.000.000
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	12.682.800.000
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	12.682.800.000
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	60.120.000.000
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	60.120.000.000
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	476.000.000.000
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	476.000.000.000
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.465.200.000
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.465.200.000
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	2.632.000.000
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	2.632.000.000
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	122.400.000.000
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	122.400.000.000
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	69.736.800.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	69.736.800.000
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	4.600.000.000
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	4.600.000.000
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.640.000.000
4.1.01.02.09.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.640.000.000
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	214.723.200.000
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	214.723.200.000
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	3.000.000.000
4.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	3.000.000.000
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.135.000.000.000
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	644.658.509.500
4.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	644.658.509.500
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	489.691.783.985
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	489.691.783.985
4.1.01.03.03	PBBKB-Bahan Bakar Gas	649.706.515
4.1.01.03.03.0001	PBBKB Bahan Bakar Gas	649.706.515
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	13.100.000.000
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	13.100.000.000
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	13.100.000.000
4.1.01.05	Pajak Rokok	560.800.000.000
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	560.800.000.000
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	560.800.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	11.669.359.773
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	8.000.000
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	8.000.000
4.1.02.01.12.0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	8.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	10.675.411.773
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.294.917.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.026.765.000
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	201.102.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	110.000.000

Lampiran 1 : Peraturan Gubernur Sumatera  
Selatan  
Nomor : 32 Tahun 2021  
Tanggal : 31 Desember 2021

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	809.050.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	45.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	100.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	3.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	1.012.500.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	212.500.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	800.000.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	491.472.273
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	491.472.273
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.000.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.000.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.318.930.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.318.930.000
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	2.750.000.000
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	2.750.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	807.592.500
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	672.592.500
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	135.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	985.948.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	75.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	75.000.000
4.1.02.03.05	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	3.500.000
4.1.02.03.05.0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	3.500.000
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	907.448.000
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	907.448.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	98.652.509.792
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	98.652.509.792
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	97.580.509.792
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	97.580.509.792
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.072.000.000
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	1.072.000.000



PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.215.218.856.481
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.100.000.000
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	5.100.000.000
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	5.100.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	28.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	28.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	28.000.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	121.500.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	121.500.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	121.500.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	15.000.000
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	15.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	15.000.000
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	731.472.048.186
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	731.472.048.186
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	731.472.048.186
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	217.500.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	217.500.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	217.500.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	111.631.808.295
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	111.631.808.295
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	111.631.808.295
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>4.856.972.461.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.856.972.461.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	4.826.846.691.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.173.020.984.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	857.737.252.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	260.008.859.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	802.352.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	577.976.720.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	6.845.113.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	306.156.446.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	136.750.442.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	26.666.442.000
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	277.358.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.563.041.287.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.563.041.287.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	211.287.490.000
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	39.968.309.000
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	1.828.133.000
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	26.930.973.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	9.952.495.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.134.661.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	13.418.715.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	17.048.678.000
4.2.01.01.03.0051	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	95.005.526.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	870.496.930.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	525.677.010.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	6.770.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	317.545.613.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	17.400.000.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	3.500.000.000
4.2.01.01.04.0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.976.461.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.416.564.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	909.482.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	301.800.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	30.125.770.000
4.2.01.02.01	DID	30.125.770.000
4.2.01.02.01.0001	DID	30.125.770.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	39.157.844.412
4.3.01	Pendapatan Hibah	39.157.844.412

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	35.552.844.412
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	35.552.844.412
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	35.552.844.412
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	3.605.000.000
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	3.605.000.000
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	3.605.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>9.902.571.031.458</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.008.939.321.622</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.605.363.817.438
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.534.298.349.774
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.159.087.139.600
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	834.044.872.600
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	325.042.267.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	125.753.306.994
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	80.819.140.994
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	44.934.166.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	14.438.691.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14.438.691.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	52.706.810.625
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	52.582.310.625
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	124.500.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.308.102.192
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14.173.732.192
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	20.134.370.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	77.536.636.808
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	46.105.379.808
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	31.431.257.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.574.568.767
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.572.568.767

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.000.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	26.265.884
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.487.761
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.778.123
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	49.647.710.133
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	33.788.198.133
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	15.859.512.000
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.179.803.981
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.292.670.981
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	887.133.000
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	8.131.087.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	5.783.428.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	2.347.659.000
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	6.908.226.790
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	5.086.308.790
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.821.918.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	439.505.614.378
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	79.548.036.378
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	77.814.996.378
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.733.040.000
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.149.240.000
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.149.240.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	358.808.338.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	352.612.938.000
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	6.195.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	467.410.517.286
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	107.971.879.772
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	30.060.000.000
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27.600.000.000
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.050.000.000
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	393.000.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.01.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	15.868.879.772
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	168.855.000
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	24.000.000
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	60.000.000
5.1.01.03.02.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	82.500.000
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.250.000
5.1.01.03.02.0029	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	105.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	317.545.613.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	317.545.613.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	17.400.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	17.400.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	24.014.449.514
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19.172.489.514
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.689.320.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	152.640.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	309.720.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	309.720.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	69.052.055.000
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	2.438.783.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	2.438.783.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	309.487.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	309.487.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	273.317.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	273.317.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	203.940.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	203.940.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	3.536.235.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	3.536.235.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	273.484.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	273.484.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.081.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.081.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	18.900.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	18.900.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	4.725.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	4.725.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.149.488.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.149.488.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	19.970.890.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	355.216.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.990.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	14.684.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	19.596.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	17.040.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	17.040.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	199.350.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	199.350.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	249.964.000
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	77.490.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	77.490.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.610.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.610.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	139.482.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	139.482.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.197.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.197.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	9.415.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	9.415.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.024.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.024.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	186.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	186.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	558.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	558.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	7.149.479.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	561.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	561.600.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	6.587.879.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	6.587.879.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	78.301.238.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	78.301.238.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	78.301.238.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	9.396.600.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	9.396.600.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	9.396.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.997.737.660.721
5.1.02.01	Belanja Barang	450.204.234.190
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	450.195.734.190
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	450.811.175
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.052.927.143
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18.632.477.675
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	368.000.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.797.428.065
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	73.500.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	186.080.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	69.825.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.154.937.825
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.510.523.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.218.070.000
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	24.500.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	5.000.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	280.000.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.681.782.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.492.030.671
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	118.048.084
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	54.385.245.383
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	796.656.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	32.390.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	41.220.182
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.175.891.570
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.357.918.870
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	12.504.094.420
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.107.810.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.335.932.608
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.926.682.799
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	13.474.007.469
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	16.855.879.750
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	110.260.069.750
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	190.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	12.667.915.180
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	152.500.000
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.617.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.533.000.843
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24.137.428.494
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	14.855.065.038
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.107.662.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	4.796.280.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.893.580.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	2.024.470.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.321.259.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	4.011.400.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	393.508.880



PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.486.617.590
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.418.674.940
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	24.000.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	40.000.000
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	600.000
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	2.250.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	680.640.000
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	9.183.286
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	12.500.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	50.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	633.400.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.568.978.600
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	3.985.705.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	170.775.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	41.000.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	8.500.000
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	1.000.000
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	773.081.955.381
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	565.371.488.537
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34.229.393.500
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.659.350.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	861.600.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	42.460.200.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	3.200.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	716.000.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	90.650.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.899.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	113.538.394.490
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	31.662.104.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	308.600.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.400.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.688.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	760.800.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.768.400.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	2.066.400.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.081.000.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	43.290.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	342.900.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	96.575.752.426
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.972.520.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.130.410.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17.401.320.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	33.225.470.900
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	9.908.310.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	727.350.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	134.530.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	286.500.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	295.850.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	10.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.793.860.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	606.400.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.142.987.700
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	866.510.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.798.670.405
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	155.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	280.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	517.740.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	215.000.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	235.000.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	3.656.710.180
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	100.000.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
 RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
 RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	42.826.957.858
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.514.560.400
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6.350.172.930
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	31.590.928.777
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.627.596.155
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16.488.404.902
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	2.454.523.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	830.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.836.550.914
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	243.220.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	375.000.000
5.1.02.02.01.0074	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	4.456.000.000
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	10.560.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	69.005.519.397
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	63.970.753.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	430.870.190
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	320.520.192
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	21.927.240
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	4.261.448.775
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	761.568.176
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	295.798.176
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	465.770.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	50.875.136.895
5.1.02.02.04.0011	Belanja Sewa Mesin Proses	251.890.000
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	355.000.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	651.400.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	388.875.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	439.900.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.719.500.000
5.1.02.02.04.0045	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	6.825.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	49.000.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0057	Belanja Sewa Kapal Terbang	3.995.000.000
5.1.02.02.04.0068	Belanja Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya	13.000.000
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	330.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.263.405.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	138.550.000
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	1.750.000
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	3.500.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	6.601.200.000
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	85.000.000
5.1.02.02.04.0135	Belanja Sewa Peralatan Cetak	60.000.000
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	309.850.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	20.196.023.195
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	1.500.000
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	12.000.000
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	61.500.000
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	12.386.268.700
5.1.02.02.04.0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	10.000.000
5.1.02.02.04.0491	Belanja Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	4.200.000
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	540.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	17.863.990.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.908.500.000
5.1.02.02.05.0003	Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	180.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.122.395.000
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.620.000.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	25.000.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	183.500.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	210.000.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	2.500.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.345.095.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.619.500.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.000.000
5.1.02.02.06.0130	Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara	5.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	369.200.000
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	327.000.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	19.200.000
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	10.000.000
5.1.02.02.07.0033	Belanja Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	8.000.000
5.1.02.02.07.0034	Belanja Sewa Barang Kerajinan	5.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	45.474.953.200
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	97.400.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	588.500.000
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	1.410.000.000
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	5.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.128.500.000
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	295.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	100.000.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	4.085.548.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	7.287.500.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	15.650.000.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	194.728.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.245.431.500
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	12.000.000
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	1.129.132.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.550.390.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.720.000.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	5.136.000.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.623.862.700
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	85.000.000
5.1.02.02.08.0025	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah	75.000.000
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	25.961.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	2.000.000.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	30.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.125.449.726
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.803.880.000
5.1.02.02.09.0005	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	763.000.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	800.000.000
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	9.930.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	322.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.701.639.726
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	450.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.275.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	817.800.000
5.1.02.02.10.0001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	100.000.000
5.1.02.02.10.0002	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Jalan	624.000.000
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	83.800.000
5.1.02.02.10.0013	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan	10.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	280.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	180.000.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	100.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	14.131.849.450
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	8.571.554.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	475.253.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	3.003.310.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	2.081.732.450
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	135.029.978.981
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.323.352.000
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	208.500.000
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	511.852.000
5.1.02.03.01.0018	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	260.000.000
5.1.02.03.01.0023	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan	50.000.000
5.1.02.03.01.0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	70.000.000
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	198.000.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
 RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
 RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.01.0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	25.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.859.957.022
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	160.000.000
5.1.02.03.02.0017	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	20.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	467.652.472
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	12.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.745.233.700
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6.080.250.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	31.000.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	25.000.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	301.061.600
5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	30.000.000
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	2.000.000
5.1.02.03.02.0091	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	30.000.000
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	15.000.000
5.1.02.03.02.0112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	24.500.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	79.000.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	440.500.000
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	195.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.509.840.845
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	939.144.052
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	596.126.400
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.309.875.733
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	84.750.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.612.640.225
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	2.000.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	15.600.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	125.000.000
5.1.02.03.02.0194	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	86.746.200
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	2.225.000.000
5.1.02.03.02.0218	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	55.000.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0244	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	200.000.000
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	64.900.000
5.1.02.03.02.0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	200.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	703.003.820
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	142.981.537
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	538.000.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	150.000.000
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	124.120.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	11.730.438
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	35.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	470.300.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.529.155.584
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	26.024.065.997
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	175.000.000
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	8.005.414.587
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	800.000.000
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	91.000.000
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.165.800.000
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.000.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	26.875.000
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	2.771.000.000
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	150.000.000
5.1.02.03.03.0054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	300.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.230.514.375
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	48.648.879.400
5.1.02.03.04.0020	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan	180.436.675
5.1.02.03.04.0021	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	98.000.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1.068.000.000
5.1.02.03.04.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	534.000.000
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	12.319.927.300
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	20.000.000



PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	26.000.000
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	710.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	563.771.000
5.1.02.03.04.0127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	60.000.000
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	1.500.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.087.000.000
5.1.02.03.05.0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	39.500.000
5.1.02.03.05.0004	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial	70.000.000
5.1.02.03.05.0018	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran	91.500.000
5.1.02.03.05.0035	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	140.000.000
5.1.02.03.05.0040	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang	200.000.000
5.1.02.03.05.0065	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi	546.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	304.690.186.874
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	287.725.648.682
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	266.891.999.102
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2.393.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.643.837.300
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.512.092.280
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.284.220.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	16.964.538.192
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	16.964.538.192
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.606.484.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.482.410.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlimbaan	4.196.160.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	9.286.250.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.124.074.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	12.935.750.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	188.324.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	210.714.633.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	210.714.633.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	210.714.633.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	97.410.208.295
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	97.410.208.295
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	97.410.208.295
5.1.03	Belanja Bunga	16.500.000.000
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	16.500.000.000
5.1.03.04.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	16.500.000.000
5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	16.500.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	389.337.823.463
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	384.374.781.863
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	381.374.781.863
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	381.374.781.863
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.000.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.000.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.963.041.600
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.963.041.600
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.963.041.600
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.445.742.037.574</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.403.511.169
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	8.403.511.169
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	8.403.511.169
5.2.01.01.02.0009	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	8.403.511.169
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	314.832.972.271
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.373.530.250
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.315.400.250
5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Tractor	755.400.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	560.000.250
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	2.058.130.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	1.180.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	10.000.000
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	277.000.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	591.130.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	43.303.058.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	43.303.058.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.154.940.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	22.993.118.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.138.000.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	97.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	8.920.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.010.000.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	4.860.000.000
5.2.02.03.01.0005	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin	4.860.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	150.000.000
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	150.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	345.000.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	345.000.000
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	55.000.000
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	290.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	51.042.396.172
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	17.353.772.925
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	200.000.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	319.732.305
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16.834.040.620
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	33.208.623.247
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	18.712.171.150
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	125.000.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	596.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	2.303.500.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	672.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.775.452.097
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	24.500.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	480.000.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	200.000.000

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	164.500.000
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	15.000.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	17.000.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	83.500.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.440.020.638
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	4.230.120.638
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.904.050.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	245.911.400
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	4.950.000
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	21.609.238
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	53.600.000
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	209.900.000
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	10.500.000
5.2.02.06.04.0007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	199.400.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	98.697.111.692
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	684.510.917
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	575.510.917
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	109.000.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	98.012.600.775
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	98.012.600.775
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	28.679.875.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	152.000.000
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	52.000.000
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	100.000.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	28.312.875.000
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	22.706.000.000
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	4.451.875.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.155.000.000
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	15.000.000
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	15.000.000
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	200.000.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	200.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	14.129.192.519
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	9.180.216.907
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	405.683.600
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	6.183.408.307
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.591.125.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.948.975.612
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	200.000.000
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	1.075.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	187.400.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	169.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.317.575.612
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	12.200.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	12.200.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	12.200.000
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	100.000.000
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	100.000.000
5.2.02.12.02.0005	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	100.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	341.739.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	341.739.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	341.739.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	200.000.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	200.000.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	200.000.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	44.823.849.000
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	44.823.849.000
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	44.823.849.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	20.335.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	20.335.000.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	20.335.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	374.675.426.771

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	370.397.126.771
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	360.878.376.771
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	82.130.285.452
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	300.000.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	83.715.721.319
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.843.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	145.922.970.000
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	11.452.000.000
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	190.000.000
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	480.000.000
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	90.000.000
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	3.574.200.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	4.420.000.000
5.2.03.01.01.0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2.250.000.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	450.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	11.457.700.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	602.500.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	9.518.750.000
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	9.518.750.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.578.300.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.578.300.000
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	1.016.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.537.000.000
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	25.300.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.700.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.700.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.700.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	663.622.420.120
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	613.395.235.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	537.395.235.000
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	535.057.740.000

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	2.337.495.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	76.000.000.000
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	76.000.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	48.327.185.120
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	21.170.919.820
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	21.170.919.820
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	3.420.000.000
5.2.04.02.02.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	3.420.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.803.500.000
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.407.500.000
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	396.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	21.932.765.300
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	21.932.765.300
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	300.000.000
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	300.000.000
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	300.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	950.000.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	950.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	950.000.000
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	650.000.000
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	650.000.000
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	650.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	83.288.206.243
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	430.000.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	336.630.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	206.630.000
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	130.000.000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	93.370.000
5.2.05.01.02.0003	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	93.370.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.461.175.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.349.375.000

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	10.000.000
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	1.339.375.000
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	111.800.000
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	111.800.000
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	29.890.822.845
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	29.890.822.845
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	29.890.822.845
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	8.040.512.398
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	8.040.512.398
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	1.381.700.000
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	6.658.812.398
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	43.315.696.000
5.2.05.88.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	43.315.696.000
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	43.315.696.000
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	150.000.000
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	150.000.000
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	150.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	919.501.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	919.501.000
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	919.501.000
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	919.501.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>16.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	16.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	16.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	16.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>3.295.789.672.262</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.777.650.000.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.777.650.000.000
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.777.650.000.000
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.777.650.000.000



PROVINSI SUMATERA SELATAN  
 RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
 RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.518.139.672.262
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.508.924.260.262
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.508.924.260.262
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.508.924.260.262
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	9.215.412.000
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	9.215.412.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	9.215.412.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.766.471.031.458</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>136.100.000.000</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>226.200.000.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	226.200.000.000
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	50.000.000
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	50.000.000
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	50.000.000
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	3.700.000.000
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	3.700.000.000
6.1.01.02.01.0071	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	2.500.000.000
6.1.01.02.01.0072	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	750.000.000
6.1.01.02.01.0073	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	450.000.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	180.000.000.000
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	180.000.000.000
6.1.01.05.04.0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	110.000.000.000
6.1.01.05.04.0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	70.000.000.000
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	42.450.000.000
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	22.450.000.000
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	22.450.000.000
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	20.000.000.000
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	20.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>226.200.000.000</b>

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>362.300.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.300.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.300.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.300.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.300.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	360.000.000.000
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	360.000.000.000
6.2.03.04.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	360.000.000.000
6.2.03.04.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	360.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>362.300.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(136.100.000.000)</b>

Gubernur Sumatera Selatan



H. Herman Deru